

BAB IV
FAKTOR PENARIK (*PULL FACTOR*) DAN KELEMAHAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA SEBAGAI PENYEBAB
PERDAGANGAN PEREMPUAN DI INDIA

Melalui uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diketahui tentang faktor pendorong penyebab tingginya tingkat perdagangan perempuan di India. Ini ternyata tidak menjadi satu-satunya faktor karena terdapat juga faktor penarik, dimana ini bukan hanya melibatkan berbagai hal dalam konteks domestik saja, namun juga konteks internasional.

Pada bab IV ini akan diuraikan tentang faktor penarik (*pull factor*) penyebab tingginya tingkat perdagangan perempuan di India. Faktor ini mencakup potensi lapangan pekerjaan di negara lain yang lebih memadai dan fasilitas wilayah perkotaan India yang lebih baik. Selain itu, faktor penarik selanjutnya adalah lemahnya kebijakan pemerintah India dalam menangani masalah ini.

A. Faktor Penarik

Faktor penarik dalam dinamika perdagangan perempuan di India merupakan faktor yang berasal dari dalam dan luar, yaitu adanya pengaruh dari negara-negara lain yang selama ini menjadi negara tujuan perdagangan perempuan, yaitu Cina dan India. Selain itu, pengaruh juga berasal dari luar yaitu kemajuan beberapa kota di

India yang menyebabkan migrasi terselubung yang diantaranya melibatkan perdagangan perempuan. Gambaran tentang hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Potensi Lapangan Pekerjaan di Negara lain

Perkembangan globalisasi yang semakin kompleks ternyata menjadikan sistem komunikasi masyarakat dunia menjadi semakin maju. Akibatnya sebuah kejadian ataupun fenomena sosial yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan mudah diakses di negara lain. Hal ini ternyata juga berpengaruh terhadap dinamika perdagangan perempuan di India.

Potensi lapangan pekerjaan menjadi salah satu pertimbangan penting. Sehingga jika ditinjau dari konteks dalam negeri maka sebagian besar jaringan perdagangan perempuan memilih wilayah perkotaan sebagai tujuan, sedangkan dalam konteks internasional, negara-negara dengan kesempatan pekerjaan yang besarlah yang menjadi tujuan, misalnya Australia, beberapa negara Asia Tenggara hingga negara-negara Eropa dalam jumlah yang relatif kecil, sedangkan Cina menjadi tujuan utama perdagangan perempuan India.

Cina merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Asia. Negara ini memiliki peranan penting sebagai tujuan perdagangan perempuan dari India karena letak kondisi geografis yang memang berdekatan. Periode 1995-2008 merupakan masa penting bagi kemajuan perekonomian, Cina didukung oleh industri-industri raksasa yang menjamur dan berkembang pesat di negara ini. Periode tersebut Cina telah berhasil menjadikan Cina sebagai negara adikuasa baru di Asia, bahkan di

dunia. Tingkat GDP (*gross domestic product*) sebagai indikator kemajuan suatu negara dari tahun ke tahun semakin meningkat pesat, sebagai gambaran pada tahun 1980 tingkat GDP Cina hanya sebesar 460.906 US Dollar, kemudian pada tahun 1985 meningkat tajam sebesar 896.440 US Dollar, pada tahun 1990 sebesar 1.854.790 US Dollar, tahun 1995 sebesar 6.079.400 US Dollar, tahun 2000 sebesar 9.921.500 US Dolar dan pada awal tahun 2005 sebesar 18.308.500 US Dollar.¹

Kemajuan perekonomian Cina tersebut ditopang oleh sektor pertanian (agrikultur) sebesar 11,7 persen, industri sebesar 48,9 persen, pelayanan jasa sebesar 39,3 persen dan sektor-sektor minoritas lainnya sebesar 5,5 persen. Kemajuan perekonomian Cina tersebut akhirnya membawa negara ini ke swasembada di berbagai bidang, bahkan hingga pada tahun 2005 Cina tidak lagi tergantung pada hutang luar negeri sebagai modal pembangunan.²

Kemajuan perekonomian Cina pada periode tahun 1978-2004 tidak lepas dari program reformasi negara yang menitik-beratkan pada upaya untuk membuka diri dari pergaulan internasional (*open door policy*) atau yang disebut sebagai “*gaige kaifang*” (reformasi dan membuka diri).³ Pasca program reformasi bidang perekonomian tersebut, tingkat pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) negara ini semakin mengalami peningkatan secara gradual. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

¹ “China Economic Profile Database”, <http://www.cia.gov>, diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

² *Ibid.*

³ I Wibowo, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004, hal.2.

Tabel 4.1.
Pertumbuhan GDP Cina Tahun 1980-2005
(Dalam US Dollar)

No	Tahun	Tingkat Pertumbuhan GDP
1.	1980	460.906
2.	1985	896.440
3.	1990	1.854.790
4.	1995	6.079.400
5.	2000	9.921.500
6.	2005	18.308.500
7.	2007	21.464.000
8.	2008	23.079.000
9.	2009	+24.000.0000*

Sumber : "China Gross Domestic Product Growth",
<http://www.chinability.com>., diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

Kemajuan perekonomian yang dicapai Cina, tidak lepas dari sumbangan industri-industri yang memproduksi barang-barang secara massal, yang berorientasi pada kemandirian masyarakat yang bekerja pada industri-industri yang menjadi bagian dari investasi asing di negara ini. Nilai inflasi pada perekonomian makro Cina juga berjalan terkendali dengan rata-rata kurang dari tiga persen pertahun.⁴

Dalam kurun waktu kurang dari kurang dari dua dekade, Cina telah menjadi negara baru raksasa industri. Berbagai industri baik pada skala kecil-menengah, hingga indutsri berat, semakin marak di negara ini. Kemajuan ini juga didukung oleh tenaga ahli yang siap pakai lulusan dalam dan luar negeri. Pada tahun 2004 saja, Cina

⁴ "China Economic Profile Database", <http://www.cia.gov>., *op. cit.*

telah memiliki 127.311 lulusan sarjana dan magister, serta 23.446 orang telah bergelar doktor, dimana lebih dari 31 persen merupakan wanita.⁵

Dukungan sumber daya manusia dan birokrasi telah menjadikan Cina sebagai negara multi industri. Industri-industri ini dapat dibedakan menjadi tiga sektor yaitu :

- a. Industri utama (*main industry*) antara lain adalah besi baja, kapaian, bahan bangunan, tekstil, barang konsumsi, alas kaki, rel dan lokomotif, peralatan telekomunikasi, manisan dan elektronik, semi konduktor, pakaian jadi, hingga satelit.
- b. Produk agrikultur (pertanian) antar alain yaitu berasm gandum, kentang, tembakau, kedelai, kacang-kacangan, teh, katun dan buah-buahan, beserta dengan hasil olahannya.
- c. Produk sumber daya alam, antara lain yaitu besi baja, minyak mentah, manadium, magnesium, merkuri, uranium sumber daya tenaga air yang merupakan terbesar di dunia.

Keterkaitan antara adanya permintaan tenaga kerja sebagai faktor penarik perdagangan perempuan dari India adalah menyangkut adanya faktor permintaan dan penawaran. Pada tahun 2008 memang RRC memiliki jumlah penduduk yang besar, namun karakter unik masyarakat RRC berpengaruh terhadap hal ini, dimana sebagian besar menginginkan untuk bekerja "dibalik meja" atau sebagai cukong (pemilik usaha). Inilah yang berakibat pada ketidaktersedianya tenaga kerja sebagai "labour". Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Gabriel Sebastian D. ALbertus

⁵ *Ibid.*

Magnus, seorang pemerhati bidang sosial, dari Universitas Princeton, New Jersey

Amerika Serikat menyatakan bahwa :

“...kemajuan industri Cina merupakan faktor penarik utama bagi kalangan pekerja ilegal dari India, sebagian diantaranya merupakan kaum perempuan yang masuk dalam jaringan trafficking internasional. Produksi masal dari industri-industri Cina sangat menjanjikan perubahan nasib bagi masyarakat India untuk bekerja di sektor tersebut”.⁶

Faktor permintaan tenaga kerja dari Cina sebagai faktor penarik *human trafficking* dari India juga dipertegas oleh pernyataan Organisasi Migrasi Internasional (IOM, *International Organization of Migration*) pada laporannya yang berjudul “The Root of International Human Trafficking” menyatakan bahwa :

“...industrialisasi di RRC pasca liberalisasi menjanjikan lapangan pekerjaan yang potensial. Munculnya industri raksasa, hingga industri rumahan (*infant industry*) mendorong masyarakat luar RRC untuk berkompetisi mendapatkan kesempatan tersebut, antara lain Taiwan, Thailand, Tibet, India, Afghanistan dan Rusia dalam jumlah kecil dan sebagian diantaranya masuk melalui jalur ilegal atau *human trafficking*”.⁷

Bukti lainnya mengenai adanya permintaan tenaga kerja sebagai faktor pendorong *women trafficking* dari India dikemukakan oleh WVFI (*World Vision Foundations of India*), sebuah organisasi yang bergerak bidang pemberdayaan masyarakat di India. Organisasi ini menyatakan laporannya pada tahun 2006 bahwa dari 35 responden korban *women trafficking* 22 orang menyatakan bahwa alasan

⁶ “Human Trafficking Between Security and Social Problem : Analytical and Approach”, <http://www.freejournalpublishing.odu>, diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

⁷ “Human Trafficking : Mainside and Analytical Overviews”, <http://www.iom.org>, diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

komunitas human trafficking untuk bermigrasi ke Cina adalah untuk memperoleh kesempatan perekonomian yang lebih baik karena pada saat yang sama India mengalami pengangguran yang terus meningkat.⁸

Bukti lainnya mengenai kesempatan ekonomi di RRC sebagai faktor pendorong *women trafficking* di India adalah menyangkut karakteristik pekerjaan yang dianggap nyaman. Dalam sistem produksi masal di RRC seorang tenaga kerja hanya bertanggung-jawab terhadap pekerjaannya sendiri, misalnya untuk penempelan label hanya bertuga untuk mengurus masalah ini, demikian halnya dengan pengemasan (*packing*) yang juga hanya mengurus masalah ini. Kegiatan ini dianggap sebagai mekanisme yang nyaman dan menguntungkan bagi korban *women trafficking* di India ke RRC.⁹

Negara selanjutnya yang menjadi tujuan perdagangan perempuan dari India adalah Australia. Berbeda dengan Cina para korban dan pelaku menggunakan jalur perairan dengan memfungsikan Indonesia, Singapura ingá Papua New Guinea sebagai transit.

Australia merupakan salah satu negara yang terbesar di dunia, sekaligus negara yang terbesar di kawasan Pasifik, baik ditinjau dari jumlah penduduk, luas wilayah ataupun kapabilitas perekonomiannya. Wilayah Australia mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra

⁸ Elite Conflict in Thailand Increase Social Stability”, <http://www.highbeam.com>., diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

⁹ Scand Asia Foundation, “Human Trafficking : The Worst Form Labour of India”, <http://www.scandasia.com>., diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

Pasifik. Negara tetangga Australia disebelah utara termasuk Indonesia, Timor Timur, dan Papua Nugini. Disebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu dan Kaledonia baru (secara administratif milik Perancis), sementara di tenggara bertetangga dengan Selandia Baru.¹⁰

Meskipun Australia terletak di dekat Asia, lebih sering disebut sebagai bagian dari dunia Barat karena kehidupannya yang mirip Eropa Barat dan Amerika Serikat. Penduduknya pun sebagian besar kulit putih. Benua Australia selama 40.000 tahun telah didiami oleh penduduk asli Australia, namun pada abad ke-17 setelah kunjungan-kunjungan sporadis dari para nelayan di utara dan penjelajah Eropa serta para pedagang, separuh wilayah timur Australia kemudian diakui sebagai wilayah Inggris di tahun 1770 dan secara resmi dijadikan pemukiman koloni terhukum (penjahat) di New South Wales pada 26 Januari 1899. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan perambahan wilayah-wilayah baru, maka lima wilayah besar yang mengelola sendiri "jajahan yang diperintah oleh Pusat" (Crown Colony) didirikan satu demi satu sepanjang abad ke-19.¹¹

Pemerintah Australia dalam rangka penegakan nilai-nilai hak asasi manusia internasional juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional PBB yang melarang beberapa tindakan pelanggaran hukum HAM yaitu :

- a. ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) melarang 3 hal yaitu pelarangan bentuk-bentuk intimidasi terhadap publik, pemaksaan nilai

¹⁰ "Australia : History and Origins", <http://www.wikipedia.org>., diakses pada tanggal 14 Juni 2008.

¹¹ *Ibid.*

terhadap individu dan penggunaan kekerasan dalam meralisir tujuan-tujuan rezim.

- b. ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Culture Right*) menuntut tanggung jawab negara dalam 3 hal yaitu menjaga kondusifitas bidang keadilan dalam perekonomian, sosial dan budaya, menjaga kelestarian kultur dan meminimalisir konflik/friksi yang terjadi secara horisontal dan menjaga stabilitas politik dengan tidak menjalankan intervensi terhadap konstituen publik masyarakat dalam bidang politik.
- c. CERD (*Conventions on the Eliminations of All Form of Racial Discriminations*) melarang 3 hal yaitu pembedaan dan pembatasan dalam berbagai hal atas dasar etnik dan warna kulit, pembatasan dalam menentukan religi atau kepercayaan dan pembatasan terhadap aspirasi terhadap publik memberikan aspirasi yang berdasar pada sukuisme.
- d. CAT (*Coventions Against Torture*) melarang 3 hal yaitu penyiksaan tanpa ada alasan yang jelas, penggunaan secara berlebih melalui para militer terhadap kasus-kasus demonstrasi dan pelaksanaan tindakan yang bertujuan sebagai pemusnahan terhadap komunitas yang kontra.
- e. CEDAW (*Convention on the Eliminations of All Form of Discrimintaions Againts Women*) melarang 3 hal yaitu pembatasan terhadap karir dan pekerjaan, kekerasan dalam rumah tangga dan negara baik dalam era damai

atau di daerah konflik dan trafiking wanita sebagai komoditas dalam pelacuran secara dipaksa di bawah tekanan (kekerasan seksual).¹²

Melalui uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Australia telah berkembang sebagai negara yang liberal dan begitu menghargai nilai-nilai HAM. Momentum ini kemudian dijadikan sebagai alasan bagi para korban dan pelaku perdagangan perempuan untuk menjadikan Australia sebagai negara tujuan.

2. Fasilitas Yang Memadai di Wilayah Perkotaan

Keterkaitan antara ketersediaan lahan untuk bertempat tinggal sebagai faktor penarik *women trafficking* di India juga menyangkut perubahan sistem demografi-politik. Pada periode 1995-2008, wilayah perkotaan India semakin berkembang menjadi negara yang liberal dan egaliter, termasuk sangat menerima terhadap kalangan masyarakat dari luar. Ini didukung dengan persamaan sosio-kultural masyarakat India apabila dilihat dari gaya hidup (*life style*), agama (*religy*) dan adat-istiadat yang hampir sama diantara keduanya.

Keterkaitan antara ketersediaan lahan untuk bertempat tinggal sebagai faktor penarik *women trafficking* di India juga didukung oleh pernyataan Roland Roberson, seorang analis Asia-Pasifik dari Universitas Melbourne, yang menyatakan sikapnya sebagai berikut :

“...pasca modernisasi ekonomi, wilayah perkotaan India semakin berkembang sebagai kiblat wilayah-wilayah di India lainnya. Negara ini

¹² *Ibid.*

menjanjikan empat hal, yaitu keamanan, ekonomi, masa depan, tempat tinggal yang memadai untuk kalangan pastoral dan agraris”¹³

Bukti lainnya mengenai ketersediaan lahan bertempat tinggal di RRC sebagai faktor penarik *women trafficking* di India juga dikemukakan oleh lembaga “Volunteer of Asia”, yang menyatakan : “persamaan kondisi sosio-kultural dan kemajuan wilayah perkotaan menjadi faktor penting bagi korban *women trafficking* untuk terus bertempat tinggal kota-kota besar di India”.¹⁴

Keterkaitan antara ketersediaan lahan untuk bertempat tinggal sebagai faktor penarik *women trafficking* India juga dikemukakan oleh lembaga “Global Security” yang menyatakan bahwa : “...wilayah-wilayah perkotaan merupakan negara yang memiliki wilayah perbatasan terbesar di dunia. Ini tentunya akan membuka peluang bagi pihak luar bertempat masuk, bertempat tinggal dan membaur dengan penduduk India lainnya”.¹⁵

B. Lemahnya Penegakan Aturan Dalam Menangani Perdagangan Perempuan

Suatu negara sangat membutuhkan suatu kebijakan tertentu dalam menghadapi masalah sosial yang terjadi di dalam negerinya, termasuk dalam hal ini adalah perdagangan perempuan. Dalam realitas kehidupan masyarakat, istilah

¹³ Roland Robertson and Kathleen E. White, “What is Globalization : Social Movement”, Blackwell Reference Online, <http://www.blackwellreference.com>, diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ “China Boredness : Frontier Moment Become to the Sprandell of Migrant Community”, <http://www.globalsecurity.org>, diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan hukum dan proposal. Padahal sesungguhnya istilah kebijakan itu memiliki definisi dan pengertian tersendiri yang berbeda dengan beberapa istilah tersebut di atas.

Istilah kebijakan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam buku *Labyrinths of Democracy*, bahwa:

“Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Definisi ini memberikan gambaran bahwa kebijakan itu berbeda pengertian dengan istilah yang kerap kali dipertukarkan maknanya dan definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan adalah istilah yang sangat dinamis. Menyadari bahwa kebijakan adalah istilah yang dinamis, Eulau dan Prewitt menyatakan bahwa: “Apa yang kebanyakan dilihat oleh para pengamat kebijakan pada suatu saat tertentu adalah suatu tingkatan atau tahapan dari serangkaian peristiwa pengembangan kebijakan”.¹⁶

Dengan ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah, menunjukkan adanya suatu kepentingan Negara yang ingin dicapai. Pada dasarnya kebijakan suatu Negara adalah untuk mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional Negara tersebut. Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis

¹⁶ *Ibid*

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.¹⁷

Kasus kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah India dalam menangani perdagangan perempuan secara elementer sebenarnya telah dijanjikan oleh rezim perdana menteri Atal Behari Vajpayee pada tahun 1998. Pada tahun ini pemerintah India berhasil menekan angka perkembangan perdagangan perempuan, namun pada tahun-tahun selanjutnya ternyata angka masalah sosial ini kembali meningkat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan penanganan women trafficking di India berkaitan erat dengan komitmen dan sikap politik (*political will*) dari penguasa.

Pada periode tahun 1995 hingga 2008 beberapa bentuk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah India dalam menangani perdagangan perempuan adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Pasal 18 Lembaran Negara India, yang mengatur tentang perlindungan warga negara, kelompok minoritas dan perempuan.
- b. Butir 28-30 Klausula B Undang-undang kewarganegaraan India yang menjelaskan tentang partisipasi warga negara dan perlindungan negara terhadap warga negara.
- c. Kebijakan darurat tahun 1998 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee yang menyatakan penegakan hukum, investigasi

¹⁷ BN. Marbun, *Kamus Politik Edisi Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal.265.

¹⁸ "

langsung dan pencegahan terhadap human trafficking dan women trafficking di India.

Paparan mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di atas ternyata kurang dapat menyelesaikan permasalahan perdagangan perempuan dari hulu hingga hilir. Dari serangkaian perundang-undangan di atas ternyata orientasi penegakan hukumnya (law enforcemennya) tidak menyentuh masalah-masalah yang berkaitan, yaitu kemiskinan, keterbelakangan dan lain-lainnya yang menimpa kelompok masyarakat marjinal di India sebagai komunitas yang rawan terdampak women trafficking.

Uraian di atas menegaskan bahwa sebenarnya perangkat aturan dalam menangani masalah perdagangan perempuan di India ternyata belum masih kurang dan belum mengulas secara mendalam tentang perdagangan perempuan. Gambaran tentang adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Kebijakan dan peraturan tentang perlindungan perempuan tenaga kerja pada tahun 2008 berjumlah 12. Menurut Badan PBB Tentang Perlindungan Perempuan (UNIFEM) sekurang-kurangnya India memerlukan 24 kebijakan dan aturan mengenai perlindungan perempuan tenaga kerja.
- b. Kebijakan dan peraturan tentang perlindungan perempuan dari kekerasan lingkungan dan rumah tangga pada tahun 2008 berjumlah 18. Menurut Badan PBB Tentang Perlindungan Perempuan (UNIFEM) sekurang-

¹⁹ "Legality and Civil Perception Disorder : India Women Trafficking Case and Analisis", <http://www.commonli.com>., diakses pada tanggal 13 April 2012.

kurangnya India memerlukan 28 kebijakan dan aturan mengenai perlindungan perempuan tenaga kerja.

- c. Kebijakan dan peraturan tentang kebebasan perempuan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak, kebebasan berekspresi dan berorganisasi, serta akses informasi yang memadai pada tahun 2008 berjumlah 8. Menurut Badan PBB Tentang Perlindungan Perempuan (UNIFEM) sekurang-kurangnya India memerlukan 16 kebijakan dan aturan mengenai perlindungan perempuan tenaga kerja.

Kebijakan dan aturan-aturan penanganan perdagangan perempuan di India ternyata memiliki kelemahan dalam penerapan aturan di lapangan. Setidaknya terdapat tiga hal penting mengenai hal ini masing-masing adalah :²⁰

- a. Jumlah petugas dan birokrat pelaksana di India yang jumlahnya terbatas dalam mengawasi serta melakukan penindakan kasus perdagangan perempuan.
- b. Perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang bersifat kontraproduktif (berseberangan) dengan nilai-nilai kultur. Sebagai contoh adalah adanya peraturan pembatasan tenaga kerja anak perempuan, namun pada kenyataannya sejak lama kaum pekerja anak telah menjadi penopang perekonomian keluarga dan diantara mereka terikat dalam konsep mutualisme.

²⁰ *Ibid.*

- c. Terdapat persepsi yang berbeda-beda antara masyarakat India, pemerintah dan pihak internasional. Sebagian masyarakat India memandang kasus perdagangan perempuan merupakan bagian dari upaya untuk memperjuangkan nasib untuk hidup yang lebih baik, sedangkan bagi pemerintah dan internasional menganggap masalah ini sebagai bagian dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi internasional. Disinilah masalah ini menjadi sebuah dilema bagi pemerintah India karena harus menyeimbangkan antara nilai-nilai yang ada dengan kepatuhan (*compliance*) terhadap rezim perdagangan manusia internasional.

Melalui uraian di atas maka dapat ditarik "benang merah" bahwa sampai dengan akhir tahun 2008 masalah diskriminasi perempuan belum terselesaikan secara mendasar karena adanya tawaran-tawaran yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir para perempuan India untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selain itu, berkembangnya masalah perdagangan perempuan di India ternyata berhubungan dengan sikap penguasa yang kurang komit dalam menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian melalui uraian di atas maka dapat diketahui tentang penyebab tingginya tingkat perdagangan perempuan di India.